

PENGARUH FUNGSI DAN KINERJA DPRD TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Daniel Imanuel¹, Robert Tua Siregar², Sarintan E. Damanik³, Arvita Netty Haloho⁴

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Fungsi dan Kinerja DPRD Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam melaksanakan Pembangunan membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Tapanuli Utara. Populasi penelitian ini adalah penduduk kabupaten Tapanuli Utara. Dengan penarikan sampel jenuh, maka sampel penelitian sebesar 100 orang. Penelitian ini menggunakan regresi ganda, metode analisis dan pengujian hipotesis. Penelitian ini memberikan informasi bahwa fungsi DPRD dan Kinerja DPRD memiliki pengaruh terhadap Pembangunan. Pengolahan data dilakukan dengan menggumpulkan data hasil kuesioner dan pengolahannya menggunakan SPSS. Dari hasil kesimpulan penelitian diketahui bahwa fungsi DPRD 0. hasil koefisien Determinasi sebesar 54,8%, sedangkan sisanya sebesar 45,2% dan kinerja DPRD. hasil koefisien Determinasi sebesar 56,5%, sedangkan sisanya sebesar 34,5%. Fungsi DPRD dan Kinerja DPRD berpengaruh secara bersama - sama terhadap pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara hasil koefisien Determinasi sebesar 61,7%, sedangkan sisanya sebesar 38,5%. Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada DPRD Kabupaten Tapanuli Utara bahwa kegiatan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan dukungan sinergis DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan DPRD.

Kata Kunci : Fungsi DPRD, Kinerja DPRD dan Pembangunan Tapanuli Utara.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of the function and performance of the DPRD on regional development in North Tapanuli Regency. In carrying out Development requires the support of all stakeholders in North Tapanuli Regency. The population of this study are residents of North Tapanuli district. With saturated sampling, the research sample is 100 people. This study uses multiple regression, analysis methods and hypothesis testing. This research provides information that the function of the DPRD and the performance of the DPRD have an influence on development. Data processing was carried out by collecting questionnaire data and processing it using SPSS. From the results of the research conclusions it is known that the function of the DPRD is 0. The determination coefficient results are 54.8%, while the remaining 45.2% and the performance of the DPRD. the coefficient of determination is 56.5%, while the remaining is 34.5%. The function of the DPRD and the performance of the DPRD have a joint effect on development in North Tapanuli Regency with a Determination coefficient of 61.7%, while the remainder is 38.5%. This research contributes thoughts and suggestions to the DPRD of North Tapanuli Regency that government and development activities require synergistic support from the DPRD of North Tapanuli Regency, the community actively participates in supervising programs and activities carried out by the DPRD.

Keywords : DPRD Function, DPRD Performance and Development of North Tapanuli.

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi karakter di Indonesia telah membawa dampak yang luas di berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, sosial budaya, politik maupun hukum. Salah satu bentuk perubahan yang cukup mendasar adalah mulai ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat oleh pemerintah, termasuk tuntutan daerah yang selama ini terkooptasi oleh pemerintah pusat. Bentuk tanggapan (respons) dari pemerintah tersebut seperti tercermin dalam bentuk reformasi hubungan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang merupakan esensi dari otonomi daerah.

Semangat reformasi dengan segala bentuk implikasinya, telah membawa kita kepada sebuah wacana harapan, yakni sistem negara dan pemerintahan yang lebih demokrasi dan transparan serta akuntabel di masa akan datang. Walaupun hal ini nampaknya masih hanya merupakan sebatas harapan bagi masyarakat di daerah, namun bukan berarti bahwa harapan tersebut tidak dapat direalisasikan, dan hal itu merupakan suatu tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh bangsa Indonesia, terutama dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Untuk menindaklanjuti harapan masyarakat tersebut, maka perlu terus - menerus memacu pembangunan di segala bidang. Dimana pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dinamis dalam upaya melakukan perubahan, pembaharuan, pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasilnya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemikiran yang terkandung dalam makna pembangunan ini adalah bahwa pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka konsekwensinya pembangunan daerah sebagai integritas pembangunan nasional mutlak harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan, baik dalam bentuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut hanya dapat tercapai bilamana terjalin hubungan kerjasama yang baik antara semua komponen pelaksana pembangunan di daerah, terutama hubungan kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif.

Perubahan paradigma pemerintahan saat ini yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai UU Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam hal ini desentralisasi tidaklah sekedar merupakan pemindahan kewenangan administrasi atau kekuasaan dari pusat ke daerah, namun juga terkandung suatu keinginan untuk memberdayakan institusi - institusi lokal dan sistem sosial yang hidup dalam masyarakat yang

senantiasa masih terabaikan dalam bentuk - bentuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang bersifat sentralistik.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai konsekwensi dari desentralisasi, selain merupakan manifestasi amanat konstitusi, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Arus reformasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini dan terlebih lagi suasana globalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai ke wilayah pedesaan menjadikan pemberian otonomi kepada daerah guna memberdayakan rakyat di daerah semakin penting. Sehubungan dengan itu menurut (Rasyid, 1999) dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, bahwa pemerintah daerah minimal harus memiliki lima kemampuan dasar, yaitu:

1. Kemampuan untuk mengatur otonomi secara optimal tanpa intervensi pemerintah pusat (*self regulating power*)
2. Kemampuan untuk melakukan terobosan - terobosan perubahan yang inovatif kearah kemajuan, khususnya dalam mengembangkan potensi wilayahnya (*self modifying power*)
3. Kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang diharapkan mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai legislatif (*Local Political Support*).
4. Kemampuan sumber-sumber keuangan yang memadai guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan yang secara riil merupakan kebutuhannya (*Financial resources*).
5. Kemampuan untuk dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang didukung ketersediaan sumberdaya manusia baik tingkat aparatur pemerintah maupun masyarakatnya (*Brain power*).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut disatu sisi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh daerah dalam memajukan pembangunan wilayahnya dan disisi lain merupakan tantangan bagi unsur - unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di daerah, dimana titik sentral dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan sumberdaya manusia unsur - unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislative (DPRD).

Dimana DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan - kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif dan efektif oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan - kebijakan pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat. Fenomena terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 45 point (e) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sejalan dengan uraian di atas, maka Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, seperti halnya dengan DPRD Kota lainnya, di era reformasi ini menempati kedudukan yang sangat strategis. Dengan kata lain, terselenggaranya demokrasi serta pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme di Kabupaten Tapanuli Utara sangat tergantung pada kemampuan kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengartikulasi, mengagregasi dan mengakumulasi aspirasi masyarakat, yang tercakup dalam pelaksanaan fungsi Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara merupakan Tim Anggaran Legislatif di DPRD Kabupaten Tapanuli Utara erat kaitannya dengan kemampuan kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan fungsinya dan berperan sebagai Tim Anggaran Legislatif. Dalam hal ini kemampuan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengenal dan memahami kondisi masyarakat, mengakomodir, merumuskan aspirasi masyarakat dalam wujud Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) tentang Anggaran Daerah, merupakan tugas utama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara wajib meningkatkan kemampuan dan kualitas kinerja anggotanya agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas-tugas yang diemban, terutama dalam pembahasan anggaran terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah termasuk pada Lembaga Legislatif Daerah (DPRD) khususnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam melaksanakan kewajibannya nampak masih sulit dilakukan secara obyektif. Dimana pengukuran kinerja Badan Anggaran (DPRD) Kabupaten Tapanuli Utara hanya lebih ditekankan kepada kemampuan dalam memahami penyerapan anggaran atau mengerjakan tugas - tugas pokok yang telah digariskan. Sedangkan suatu lembaga legislatif (DPRD) utamanya anggota dewan yang duduk pada Badan atau komisi dapat dikatakan berhasil melaksanakan kewajibannya apabila salah satunya dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat.

Dengan demikian untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kinerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan fungsinya, maka seluruh badan anggaran tersebut harus dapat diukur, termasuk jumlah Perda yang dihasilkan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pada kenyataannya pelaksanaan akuntabilitas kinerja badan anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara nampak belum dilaksanakan secara cermat dan optimal. Hal ini didasarkan pada alasan, bahwa pelaksanaan otonomi daerah menuntut setiap daerah untuk mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri termasuk penyediaan sumber-sumber keuangan daerah, sehingga lembaga legislatif bersama - sama dengan eksekutif diharapkan mampu menciptakan berbagai produk peraturan daerah (Perda) yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian intensitas kerja anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara juga akan semakin meningkat. Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang

kinerja badan anggaran DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menjalankan fungsinya, sesuai dengan judul penelitian yang diajukan dalam rangka penulisan tesis ini “Pengaruh Fungsi Dan Kinerja DPRD Terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan regresi ganda, metode analisis dan pengujian hipotesis. Penelitian ini memberikan informasi bahwa fungsi DPRD dan Kinerja DPRD memiliki pengaruh terhadap Pembangunan. Teknik pengumpulan data menggunakan 1. Teknik Quesioner, 2. Teknik Observasi, Teknik Kepustakaan dan Dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan menggumpulkan data hasil kuesioner dan pengolahannya menggunakan SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adminstrasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km² yang terdiri dari luas daratan 3.793,71Km² dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km². Perhitungan luasan ini didasarkan pada amanat Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan. dengan batas - batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten TobaSamosir

Sebelah Timur : Kabupaten Labuhan Batu Utara

Sebelah Selatan: Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Humbang Hasundutan dan TapanuliTengah.

Perkembangan wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai akhir tahun 2015, secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 241 desa diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

	Kecamatan	Ibukota	Desa	Kelurahan	Luas
1	Parmonangan	Parmonangan	14	-	257.35
2	Adiankoting	Adiankoting	16	-	502.90
3	Sipoholon	Sipoholon	13	1	189.20
4	Tarutung	Tarutung	24	7	107.68
5	Siatas Barita	Siatas Barita	12	0	92.92
6	PahaeJulu	Onan Asang	18	1	165.90
7	PahaeJae	Sarulla	12	1	203.20
8	Purbatua	Parsaoran Janji Angkola	11	-	191.80
9	Siamangumban	Siamangumban	8	-	150.00
10	Pangaribuan	Pangaribuan	26	-	459.25
11	Garoga	Garoga	13	-	567.58
12	Sipahutar	Sipahutar	25	-	408.22
13	Siborong - borong	Siborong - borong	20	1	279.91
14	Pagaran	Sipultak	14	-	138.05
15	Muara	Muara	15	-	79.75
			241	11	3.793.71

Sumber : BPS TAPUT 2016

Tabel 2. Jumlah Penduduk tiap Kecamatan

No	Kecamatan	Luas	Jlh Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan
1.	Parmonangan	257,35	3309	13 788	54
2.	Adiankoting	502,90	3444	14 692	29
3.	Sipoholon	189,20	5652	23 569	125
4.	Tarutung	107,68	9637	41 815	388
5.	Siatas Barita	92,92	3120	13 831	149
6.	Pahae Julu	165,90	3028	12 436	75
7.	Pahae Jae	203,2	2733	11 189	55
8.	Purbatua	191,80	1810	7583	40
9.	Simangumban	150,00	1787	7727	52
10.	Pangaribuan	459,25	6461	28 300	62
11.	Garoga	567,58	3796	16 494	29
12.	Sipahutar	408,22	5881	25 976	64
13.	Siborongborong	279,91	10 400	46 751	167
14.	Pagaran	138,05	3974	17 511	127
	2016	3793,71	68 316	295 613	78
	2015	3793,71	67 805	293399	77

Sumber : BPS TAPUT 2016

Tabel 3. Jumlah Pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara

No	Kecamatan	SD	MI	SMP	MTs	SMU	MA	SMK
1.	Parmonangan	32	-	7	-	2	-	1
2.	Adiankoting	24	-	6	-	1	-	-
3.	Sipoholon	27	-	6	-	1	-	4
4.	Tarutung	38	1	9	1	7	-	2
5.	Siatas Barita	14	-	3	-	-	-	3
6.	Pahae Julu	22	1	4	1	1	1	1
7.	Pahae Jae	14	1	2	1	1	1	3
8.	Purbatua	10	1	3	-	1	-	-
9.	Simangumban	11	-	2	-	1	-	-
10.	Pangaribuan	36	-	7	-	1	-	2
11.	Garoga	29	-	6	-	1	-	1
12.	Sipahutar	39	-	6	-	1	-	2
13.	Siborongborong	44	-	10	-	4	-	3
14.	Pagaran	24	-	4	-	2	-	1
15.	Muara	21	-	4	-	1	-	1
	Tapanuli Utara	385	4	79	3	25	2	24

Sumber : BPS TAPUT 2016

Hasil Penelitian

Penjelasan Responden Atas Fungsi DPRD

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan variabel Fungsi DPRD (X_1) adalah seperti pada Tabel 4 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 4. Penjelasan Responden atas Variabel Fungsi DPRD

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Kemampuan melaksanakan anggaran memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	4	4	15	15	28	28	43	43	13	13
Kemampuan melaksanakan kegiatan anggaran pemerintahan memberikan sumbangan besar dalam kinerja aparatur DPRD.	12	12	17	17	29	29	34	34	8	8

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
kemampuan melakukan kegiatan rapat musrenbang desa memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	3	3	20	20	34	34	38	38	5	5
kemampuan menyusun rencana kerja tahunan memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	3	3	11	11	30	30	33	33	7	7
Kemampuan melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	5	5	19	19	22	22	46	46	8	8
Kemampuan melakukan kegiatan perayaan keagamaan memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	4	4	19	19	22	22	46	46	12	12
Kemampuan menyerap pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	8	8	25	25	17	17	40	40	10	10
Kemampuan menyerap pendapat lembaga kemasyarakatan memberikan sumbangan besar dalam DPRD.	7	7	15	15	22	22	41	41	15	15
Kemampuan berkomunikasi dengan pemerintahan lebih tinggi memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	10	10	15	15	29	29	34	34	12	12
Kemampuan berkomunikasi dengan instansi vertikal pemerintahan lainnya memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.	5	5	15	15	33	33	35	35	12	12

Sumber: Hasil Penelitian 2018 (data diolah)

Dari tabel 4 diatas menggambarkan jawaban responden penelitian tentang instrumen penelitian. Melaksanakan pengkajian substansi Rancangan APBD dan rancangan Peraturan Responden menjawab setuju sebanyak 43 orang (43%). Membahas tentang Rancangan APBD dan Peraturan sesuai potensi daerah. responden menjawab setuju sebanyak 34 orang (34%). Memberikan masukan berkaitan dengan Rancangan APBD dan peraturan. responden menjawab setuju sebanyak 38 orang (38%). Peran aktif dalam mengajukan perubahan pembahasan Rancangan APBD dan peraturan responden yang menjawab sebanyak 33 orang setuju (33%). Melaksanakan pendidikan politik kepada anggota DPRD responden menjawab setuju sebanyak 46 orang (46%). Mengikuti pelatihan penyusunan anggaran dan peraturan. responden menjawab setuju sebanyak 46 orang (46%). Berperan aktif dalam perkembangan ekonomi pembangunan dan peraturan responden menjawab setuju sebanyak 40 orang (40%). Melakukan Pengawasan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan peraturan secara rutin dan periodik. responden menjawab setuju sebanyak 41 orang (41%). Melaksanakan Sanksi hukum yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku atas penyimpangan pelaksanaan Anggaran dan Peraturan Daerah responden menjawab setuju sebanyak 34 orang (34%). Menerima dan merespon laporan dari masyarakat mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35%).

Penjelasan Responden Atas Variabel Kinerja DPRD

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel Kinerja DPRD (X_2) adalah seperti pada Tabel 5 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 5. Penjelasan Responden atas Variabel Kinerja DPRD

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Kurang Setuju		Cukup Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Melaksanakan pengkajian substansi Rancangan APBD dan rancangan Peraturan	6	6	10	10	36	36	37	37	11	11
Pembahasan tentang Rancangan APBD dan Peraturan sesuai potensi daerah	10	10	10	10	30	30	40	40	10	10
Memberikan masukan berkaitan dengan Rancangan APBD dan peraturan	9	9	20	20	18	18	38	38	15	15
Peran aktif dalam mengajukan perubahan pembahasan Rancangan APBD dan peraturan	5	5	10	10	35	35	45	45	5	5
Melaksanakan pendidikan politik kepada anggota DPRD	26	26	27	27	9	9	35	35	3	3
Mengikuti pelatihan penyusunan anggaran dan peraturan	10	10	15	15	25	25	35	35	15	15
Berperan aktif dalam perkembangan ekonomi pembangunan dan peraturan	9	9	22	22	32	32	28	28	9	9
Melakukan Pengawasan pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan peraturan secara rutin dan periodic	5	5	15	15	30	30	30	30	20	20
Sanksi hukum yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku atas penyimpangan pelaksanaan Anggaran dan Peraturan Daerah	3	3	25	25	22	22	36	36	14	14

Sumber: Hasil Penelitian 2018 (data diolah)

Dari tabel 5 diatas menggambarkan jawaban responden penelitian tentang instrumen penelitian. Kemampuan melaksanakan anggaran memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD Responden menjawab setuju sebanyak 37 orang (37%). Kemampuan melaksanakan kegiatan anggaran pemerintahan memberikan sumbangan besar dalam kinerja aparatur DPRD responden menjawab setuju sebanyak 40 orang (40%). kemampuan melakukan kegiatan rapat musrenbang desa memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD responden menjawab setuju sebanyak 38 orang (38%). kemampuan menyusun rencana kerja tahunan memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD responden yang menjawab setuju sebanyak 45 orang (45%). Kemampuan melakukan sosialisasi kepada masyarakat memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35%) setuju. Kemampuan melakukan kegiatan perayaan keagamaan memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35%). Kemampuan menyerap pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD. responden menjawab setuju sebanyak 28 orang (28%). Kemampuan menyerap pendapat lembaga kemasyarakatan memberikan sumbangan besar dalam DPRD responden menjawab setuju sebanyak 30 orang (30%). Kemampuan berkomunikasi dengan pemerintahan lebih tinggi memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD responden menjawab setuju sebanyak 36 orang (36%). Kemampuan berkomunikasi dengan instansi vertikal pemerintahan lainnya memberikan sumbangan besar dalam kinerja DPRD.

Penjelasan Responden Atas Variabel Pembangunan

Tanggapan responden terhadap daftar pertanyaan yang diberikan untuk variabel Pembangunan (Y) adalah seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 6. Penjelasan Responden atas Variabel Pembangunan

Item Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju		Kurang Setuju		Cukup Setuju		Setuju		Sangat Setuju	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Anda puas dengan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara	26	26	5	5	28	28	35	35	6	6
Dari sudut pandang ekonomi, sudah dilaksanakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara	4	4	22	22	27	27	35	35	12	12
Menurut Bapak/Ibu sudahkan dilaksanakan prioritas Pembangunan fisik Kabupaten Tapanuli Utara	10	10	32	32	12	12	36	36	6	6
Pembanguna tersebut telah sesuai dengan usulan warga pada pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara	18	18	34	34	12	12	29	29	7	7
Dukungan masyarakat mempengaruhi terlaksananya pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara	8	8	36	36	39	39	15	15	2	2
Kepedulian dan kepekaan perumusan kelahiran perundangan memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah	12	12	25	25	33	33	26	26	5	5
Memperkuat daya dukung DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah.	19	19	29	29	17	17	26	26	5	5
Akuntabilitas pelaksanaan perundangan. memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah.	24	24	22	22	12	12	23	23	19	19
Komunikasi sinergis dengan sesama Pemerintah dan DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah	11	11	23	23	25	25	31	31	10	10

Sumber: Hasil Penelitian 2018 (data diolah)

Dari tabel diatas menggambarkan jawaban responden penelitian tentang instrumen penelitian. Anda puas dengan pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35%). Dari sudut pandang ekonomi, sudah dilaksanakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara responden menjawab setuju sebanyak 35 orang (35%). Menurut Bapak/Ibu sudahkan dilaksanakan prioritas Pembangunan fisik Kabupaten Tapanuli Utara responden yang menjawab setuju sebanyak 36 orang (36%) Pembanguna tersebut telah sesuai dengan usulan warga pada pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, responden menjawab setuju sebanyak 29 orang (29%) setuju. Dukungan masyarakat mempengaruhi terlaksananya pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara responden menjawab setuju sebanyak 25 orang (25%). Kepedulian dan kepekaan perumusan kelahiran perundangan memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah responden menjawab setuju sebanyak 26 orang (26%). Memperkuat daya dukung DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah responden menjawab setuju sebanyak 26 orang (26%). Akuntabilitas pelaksanaan perundangan. memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah responden menjawab setuju sebanyak 23 orang (23%). Komunikasi sinergis dengan sesama Pemerintah dan DPRD memberikan sumbangan besar bagi pembangunan daerah, responden menjawab setuju sebanyak 31 orang (31%) Komunikasi sinergis DPRD dengan pemerintah dan masyarakat memberikan sumbangan besar pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Utara. menjawab setuju sebanyak 36 orang (36%).

PEMBAHASAN

Fungsi DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil persamaan regresi $Y = 9,539 + 0,627 X_1$ diperoleh hasil $t_{hitung} = 10.898$ sedangkan $t_{tabel} = 7,94$. Dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, berarti bahwa

Pembangunan yang didukung oleh Fungsi DPRD dan Kinerja DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,548 atau 54,8 % yang menunjukkan kemampuan Fungsi DPRD dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Pembangunan sebesar 54,8%, sedangkan sisanya sebesar 45,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Kinerja DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil analisis persamaan regresi $Y = 10,398 + 0,580 X_2$ diperoleh hasil $t_{hitung} = 11,274$ sedangkan $t_{tabel} = 7,94$. Dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, berarti bahwa pengaruh Pembangunan yang didukung oleh kinerja DPRD dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,565 atau 56,5 % yang menunjukkan kemampuan kinerja DPRD dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Pembangunan sebesar 56,5%, sedangkan sisanya sebesar 43,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

Fungsi DPRD dan Kinerja DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan di kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil analisis persamaan regresi $Y = 7,804 + 0,326 X_1 + 0,341 X_2$ diperoleh hasil $F_{hitung} = 78,240$, sedangkan $F_{tabel} = 4,79$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti bahwa pengaruh pembangunan yang didukung oleh fungsi DPRD dan kinerja DPRD dalam melaksanakan Pembangunan di kabupaten Tapanuli Utara. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,617 atau 61,7 % yang menunjukkan kemampuan fungsi DPRD dan Kinerja DPRD dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Pembangunan sebesar 61,7%, sedangkan sisanya sebesar 38,5% tidak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil persamaan regresi $Y = 9,539 + 0,627 X_1$ diperoleh hasil $t_{hitung} = 10,898$ sedangkan $t_{tabel} = 7,94$. Dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, berarti bahwa Pembangunan yang didukung oleh Fungsi DPRD dan Kinerja DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,548 atau 54,8 % yang menunjukkan kemampuan Fungsi DPRD dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Pembangunan sebesar 54,8%, sedangkan sisanya sebesar 45,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.
2. Kinerja DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil analisis persamaan regresi $Y = 10,398 + 0,580 X_2$ diperoleh hasil $t_{hitung} = 11,274$ sedangkan $t_{tabel} = 7,94$. Dengan $T_{hitung} > T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$, berarti bahwa pengaruh Pembangunan yang didukung oleh kinerja DPRD dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,565 atau 56,5 % yang menunjukkan kemampuan kinerja DPRD dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Pembangunan sebesar 56,5%, sedangkan sisanya sebesar 43,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

3. Fungsi DPRD dan Kinerja DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan di kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil analisis persamaan regresi regresi $Y = 7,804 + 0,326 X_1 + 0,341 X_2$ diperoleh hasil $F_{hitung} = 78.240$, sedangkan $F_{tabel} = 4,79$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig (0,000) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti bahwa pengaruh pembangunan yang didukung oleh fungsi DPRD dan kinerja DPRD dalam melaksanakan Pembangunan di kabupaten Tapanuli Utara. Nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,617 atau 61,7 % yang menunjukkan kemampuan fungsi DPRD dan Kinerja DPRD dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada Pembangunan sebesar 61,7%, sedangkan sisanya sebesar 38,5% tidak dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1990, Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR yang Diinginkan oleh UUD 1945, dalam Jurnal Ilmu Politik, Nomor 7, AIPI, LIPI, dan PT. Gramedia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Tapanuli Utara, 2016.
- David Osborne Ted Gaebler, 1997, Reinventing Government: How the Enterprineurial Spirit is Transforming the Public Sector, Penterjemah Abdul rasyid Cetakan ke tiga PT. Ikrar Mandiri Abadi Jakarta.
- Depdagri, 2001. Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Penataan Kewenangan, Kelembagaan dan Personil, DDN dan Otoda, Jakarta.
- IsIamy, Irfan M. ; 2003; Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara; Diterbitkan PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 1993. Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Osborne, David dan Peter Plastik, 2001; Banishing, Bureaucracy : The five Strategies for Reinventing Government, penterjemah : Abdul Rasyid Ramelan, Cetakan Kedua (Revisi) oleh cv. Taruna Grafica Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 1999. Otonomi Daerah Dalam Kesatuan Negara Kesatuan, BPFE. Yogyakarta.
- SjSumarto, Hetifah, 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, D. H., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2021). Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 1-15
- Hasibuan, I., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2020). Interaksi Desa Kota Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Simalungun (Studi Kasus Di Desa Perbatasan). *Jurnal Regional Planning*, 2(2), 79-88.
- Gultom, M., Silalahi, M., Hutagalung, G., & Marbun, J. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Di Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 2(1), 26-41
- Silalahi, M., Manullang, M., Siregar, R. T., & Damanik, S. E. (2021). Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Regional Planning*, 3(1), 16-28.